

Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia

Grienda Qomara

*Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru menjadi kajian yang menarik bagi para penstudi Hubungan Internasional. Hal ini dikarenakan dalam pergeseran hegemoni dunia sebagian besar ditandai dengan perang. Pergeseran kekuatan hegemoni juga memancing pertanyaan yang kontekstual dengan kekhasan peluang kekuatan hegemoni tersebut. Artikel ini berusaha untuk mengelaborasi strategi yang mendorong kebangkitan ekonomi Tiongkok. Terdapat beberapa hal yang menjadi pendorongnya seperti kebijakan sovereign wealth fund, penguasaan negara dalam perusahaan-perusahaan di sektor strategis, dan peningkatan kekuatan militer. Meskipun begitu, kebangkitan Tiongkok bukan tanpa hambatan. Beberapa permasalahan seperti energi, lingkungan, sengketa teritorial, dan kesenjangan ekonomi. Terakhir, penulis berusaha untuk mengelaborasi relevansi strategi pendorong kebangkitan dan beberapa permasalahan terhadap kemungkinan kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.

Kata-Kata Kunci: *Tiongkok, strategi, tantangan, kekuatan ekonomi baru, relevansi, Indonesia*

The rise of China as the new world economic is interesting. The shift of hegemony is usually marked by war. The shift of hegemonic power also raises contextual question with its unique. This paper aims to elaborate the pushing strategy of rising Chinese's economics. Several reasons behind China's rise are the sovereign wealth fund foreign policy, state-owned enterprises in strategic sectors, and the improvement of military force. However, China's rising is not without obstacles. Some problems rises are energy issues, environment, territorial dispute, and economic gap. In the end, the writer attempts to elaborate the relevancy of China's strategy and some obstacles it faced to the development of Indonesia's economy.

Keywords: *China, strategy, obstacles, emerging power, relevancy, Indonesia*

Kebangkitan Tiongkok sebagai ekonomi baru dicirikan dengan pertumbuhan ekonominya yang menyentuh dua digit. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 10,4%. Pertumbuhan Tiongkok kemudian menurun pada tahun 2011 dari 9,3% menjadi 7,7%. Hingga tahun 2013 pertumbuhannya tetap pada kisaran 7,7%. Meskipun menurun, pertumbuhan ekonomi ini menjadi pertumbuhan ekonomi yang terbesar di dunia secara kuantitatif. Strategi Tiongkok seperti buruh yang murah, penguasaan sektor strategis, impor diaspora, geopolitik minyak, pengembangan riset menjadi senjata utama Tiongkok. Kendati demikian, Tiongkok memiliki beberapa hambatan seperti degradasi lingkungan, usia populasi yang menua, dan kesenjangan ekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi strategi kemajuan Tiongkok bagi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia.

Perkembangan Ekonomi Tiongkok

Tiongkok memulai pembangunannya sejak Revolusi Kebudayaan yang dicetuskan oleh Mao Tse Tung. Setelah invasi Jepang pada Perang Dunia II dan perang sipil yang berakhir tahun 1949, Tiongkok melakukan Revolusi Kebudayaan dengan langkah cepat untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, pembangunan, dan kesejahteraan. Revolusi Kebudayaan di Tiongkok menjadi pengalaman ekonomi, politik, sosial dan budaya yang paling berbahaya di dunia (Straszheim 2008).

Orientasi ini kemudian berputar balik pada tahun 1979 ketika Deng Xiaoping menggulingkan kekuasaan militer di bawah Mao. Xiaoping dan kekuatan neokapitalis lainnya dengan Partai Komunis Tiongkok kemudian melakukan neoliberalisasi perdagangan melalui investasi dari perusahaan transnasional, aktivitas keuangan global, pengaruh imperialis yang mengendalikan institusi seperti Bank Dunia dan WTO serta saluran ideologi dan budaya. Tiongkok kemudian lebih bergantung pada investasi dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman (Lotta 2009). Kebijakan pro-pasar ini sukses, ditandai dengan keberhasilan Tiongkok mencapai catatan pertumbuhan ekonomi yang terbesar sepanjang sejarah selama seperempat abad terakhir (Straszheim 2008).

Pertumbuhan Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia selama tiga dekade terakhir. Saat ini, Tiongkok adalah pabrik dunia yang tidak hanya memproduksi garmen dan mainan tetapi juga komponen komputer, mobil, dan pesawat terbang. Tiongkok berhasil meluncurkan misi ke luar angkasa dan berencana akan melakukan eksplorasi lanjutan. Tiongkok menginvestasikan teknologi tinggi seperti nanoteknologi dan sel bahan bakar yang akan membantu membangun kepemimpinan negara dalam perekonomian dunia (Shenkar 2006). Dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok termasuk dalam lima tujuan utama investasi industri luar negeri di dunia. Konsumsi bahan besi, aluminium, tembaga, dan baja mencapai 20% dari konsumsi global (Lotta 2009).

Perusahaan Milik Negara

Salah satu strategi khas Tiongkok adalah penguasaan negara dalam perusahaan-perusahaan di sektor strategis. Sektor yang dianggap vital dan strategis adalah persenjataan, *electric power*, telekomunikasi, tambang, perikanan, minyak, petrokimia, baja, besi dan lain-lain. Terdapat aturan umum di dalam masing-masing industri ini, yakni *don't call us, we'll call you*. Hal ini menandakan bahwa Tiongkok berinisiatif untuk menempatkan perusahaan milik negaranya menjadi perusahaan kelas dunia. Namun hal yang masih diragukan adalah kemampuan negara untuk menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut dapat bersaing di tingkat dunia (Straszheim 2008).

Konsekuensinya yakni aparaturnya lebih diutamakan daripada kepentingan perusahaan milik negara. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan milik negara, yang menjadi manajer senior dan pimpinan adalah anggota pejabat resmi Partai Komunis Tiongkok. Dalam pembuatan keputusan akan tergantung pada pembuatan lapangan pekerjaan dan pendapatan rakyat, daya saing dan independensi global jangka panjang Tiongkok, pembangunan ekonomi regional, peningkatan teknologi, dan pendapatan dari pajak untuk memperkuat sektor publik. Negara memberikan subsidi dan mengurangi pajak bagi perusahaan milik negara ini. Selain itu negara juga bisa memberikan penalti kepada perusahaan pesaing

yang bukan milik negara. Maka yang terjadi kemudian adalah tidak ada perusahaan multinasional milik asing yang dapat bersaing dengan perusahaan milik negara (Staszheim 2008).

Perusahaan milik negara menjadi kekuatan utama di Tiongkok. Negara juga menetapkan moneter dan kebijakan pajak. Perusahaan milik negara di sektor perbankan mengendalikan 35% dari ekonomi Tiongkok. Sejak 1995, perusahaan milik negara direstrukturisasi. Tiongkok mengembangkan sejumlah perusahaan milik negara yang mampu menghasilkan jutaan pekerjaan. Karena ketergantungannya dengan impor bahan baku dari luar, Tiongkok berusaha mengembangkan produksi yang lebih canggih. Kelas borjuis Tiongkok berusaha untuk memperluas keberagaman industri yang berbasis teknologi dan memengaruhi sektor pembangunan. Perusahaan otomotif seperti Volkswagen dan General Motor yang masuk ke Tiongkok harus melakukan transfer teknologi dari perusahaan transnasional tersebut. Rezim yang berkuasa di Tiongkok berusaha untuk menjaga kerjasama yang menguntungkan pemerintah. Tiongkok juga berinvestasi dalam skala besar dan jangka panjang dalam bidang riset dan pengembangan. Pemerintah juga mempromosikan perusahaan negara dan swasta dalam industri komputer dan telekomunikasi (Lotta 2008).

Sovereign Wealth sebagai Kebijakan Luar Negeri

Sebagai hasil dari buruh murah dan tentunya biaya produksi yang murah, serta impor teknologi dan talenta, neraca perdagangan Tiongkok mengalami surplus. Konsekuensinya adalah Tiongkok mengembangkan cadangan valuta asing yang didistribusikan dalam *sovereign wealth fund – the China Investment Corporation* (CIC). Dari valuta asing Tiongkok yang berkisar antar 1.850 triliun dolar AS, sekitar 200 triliun dialokasikan untuk investasi CIC di luar negeri. Di tahun mendatang, sekitar setengah dari total valuta asing akan ditujukan untuk hal ini. Tiongkok akan menggunakan cadangan valuta asing ini untuk berinvestasi di banyak negara dan mengakumulasi kepemilikan perusahaan global dan barang tetap (*real estate*), dan mengembangkan teknologi dan talenta di sektor domestik (Staszheim 2008).

Dalam laporan tahunan CIC tahun 2009, tujuan dari CIC adalah mencapai pengembalian jangka panjang dari pemilik saham (the State Council). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, CIC menetapkan beberapa empat prinsip kunci dalam berinvestasi. Pertama adalah memilih investasi berdasarkan pada kriteria komersial. Kedua adalah sebagai langkah pasif dan investor keuangan, CIC tidak mengendalikan perusahaan. Ketiga, CIC berusaha untuk menyesuaikan dengan hukum dan regulasi dari negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Keempat, investasi dipilih berdasarkan standar penggunaan riset dalam teknis evaluasi. CIC juga merupakan anggota dari forum internasional *Sovereign Wealth Funds* (IFSWF) (Martin 2010).

Kebutuhan Energi dan Strategi Geopolitik

Pembangunan dan industri Tiongkok sangat tergantung pada impor bahan bakar energi, bahkan hingga tahun 2033. Untuk menanggulangi ketergantungan terhadap sumber daya energi Tiongkok meluncurkan program nuklir terbesar sepanjang sejarah. Direncanakan akan didirikan 40 program baru dengan daya 1000 megawatt. Saat ini Tiongkok baru membangun 11 reaktor nuklir dan baru bisa memenuhi 1 persen kebutuhan total energi. Nuklir akan menjadi sumber energi utama di masa depan. Tiongkok merupakan produser terbesar sumber daya hidroelektrik. Dengan tiga proyek dam Gorger cukup untuk memenuhi 5% kebutuhan total energi Tiongkok. Selain itu, energi alternatif baru akan menjadi fokus utama Beijing. Hal ini termasuk angin, solar, geotermal, dan biomasa. Apabila energi alternatif baru ini dapat dikembangkan dengan baik maka bukan tidak mungkin di tahun 2033 Tiongkok akan dapat memenuhi kebutuhan energinya (Staszheim 2008).

Tiongkok mengembangkan kerjasama dengan Afrika sejak tahun 1999. Kini Tiongkok menjadi partner terbesar Afrika. Perusahaan minyak milik negara Tiongkok menguasai ladang minyak di Sudan. Selain itu Tiongkok menjadi investor di industri minyak di Algeria. Investasi juga dikembangkan ke Angola dan Nigeria. Afrika kini menyediakan 30% kebutuhan minyak Tiongkok. Perusahaan pertambangan Tiongkok mencari kobalt, uranium, tembaga, dan industri mineral lainnya. Hal ini didukung pemerintah Tiongkok

untuk dapat lebih dekat dengan pemerintah Kongo, Zimbabwe, dan Zambia (Lotta 2009).

Industrialisasi di Tiongkok membutuhkan pasokan energi global. Hal ini dikarenakan Tiongkok kehabisan energi. Ladang minyak yang lama seperti Daqing di daerah timur laut telah habis dan belum ditemukan ladang baru (Kristof 1993). Untuk mencukupi kebutuhan energi, Tiongkok melakukan kerjasama dengan Kanada yang dikenal sebagai surga mineral dan air. Selain itu yang terpenting Kanada adalah sumber inovasi yang sangat dibutuhkan dalam industrialisasi Tiongkok (Shenkar 2006).

Militer dan Ketakutan Imperialisme Tiongkok

Terdapat tendensi dalam masyarakat internasional bahwa Tiongkok akan mengembangkan kekuatan militernya untuk menggertak negara-negara tetangganya. Peningkatan anggaran militer juga digunakan untuk mengurangi pengaruh ancaman Rusia di kawasan Laut Tiongkok Selatan (Kristof 1993).

Sementara itu Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa pengeluaran Tiongkok dalam bidang militer lebih besar dari jumlah yang tertera. Alasan investasi Tiongkok dalam bidang militer disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kekuatan militer Tiongkok diperlukan untuk melindungi modernisasi. Isu yang disertakan tidak hanya tentang sistem persenjataan tetapi juga kemampuan untuk mengkoordinasikan beberapa kesatuan ganda dalam perusahaan modern. Kedua, tujuan militer Tiongkok adalah untuk melindungi dan memenuhi kepentingan strategi dan nasionalnya dengan negara lain (seperti reunifikasi Taiwan), termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi (kontrol terhadap sumber daya mentah yang vital dan rute pasokan mereka). Ambisi militer dan ekspansi ekonomi Tiongkok berlangsung saling berkelindan dan beriringan. Tiongkok juga mengembangkan kemampuan kapal, rudal balistik, dan teknologi tingkat tinggi untuk eksplorasi luar angkasa (Shenkar 2006).

Militer tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi Tiongkok, tetapi juga progres ekonomi yang vital untuk mencapai pertumbuhan dan modernisasi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi

menghasilkan lebih banyak sumber daya yang kemudian digunakan untuk membangun kekuatan ekonomi. Semakin banyak teknologi yang ditransfer ke Tiongkok, maka akan semakin menguntungkan Tiongkok. Kerjasama dengan Kanada sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat membantu Tiongkok dalam mengembangkan teknologi militer (Shenkar 2006).

Demografi dan Penyimpangan Sosial

Di awal tahun 1970, Tiongkok memutuskan untuk menurunkan tingkat kelahiran untuk meningkatkan standar hidup domestik. Sebagai hasilnya sekarang kita menyaksikan populasi Tiongkok yang menua. Usia rata-rata orang Tiongkok sekarang sekitar 32 tahun. Di tahun 2033 diperkirakan akan meningkat menjadi 42 tahun (Staszheim 2008). *One-Child Policy* membuat populasi produktif Tiongkok lebih sedikit daripada usia non-produktif. Diperkirakan penuaan populasi akan terjadi sebelum Tiongkok mengalami kejayaan. *One-Child Policy* juga menjadikan populasi laki-laki lebih banyak dari perempuan. Diperkirakan pada tahun 2033 populasi Tiongkok akan mengalami ketidakseimbangan gender.

Direktur Biro Statistik Nasional Tiongkok menyerukan kebijakan satu anak yang lama diberlakukan di negara tersebut diubah karena menyusutnya usia kerja. Pada tahun 2011 penduduk usia kerja di Tiongkok mengalami penurunan sebesar 3,45 juta. Pada bulan Oktober 2011 Lembaga penelitian dan Pengembangan Tiongkok mengusulkan agar mengendurkan kebijakan ini. Menurut mereka kebijakan satu anak membuat Tiongkok membayar biaya politik dan sosial yang besar. Dengan tingkat kelahiran yang rendah dikombinasikan dengan populasi penduduk yang usianya semakin menua serta ketimpangan gender yang tinggi disebabkan oleh kecenderungan memilih anak lelaki.

Sementara itu, menurut Direktur Rubicon Strategi Grup, Benjamin Shobert, kebijakan satu anak atau kebijakan keluarga berencana yang pernah diterapkan di negara itu telah membuat ekonomi Tiongkok hari ini dipenuhi oleh angkatan kerja tua yang sudah mendekati masa pensiun. Hal ini diperparah dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang menambah usia harapan hidup. Persoalan

rasio ketergantungan yang tinggi menjadi masalah tersendiri bagi Tiongkok. Di satu sisi pemerintah ingin mengurangi jumlah penduduk. Di sisi lain kebutuhan angkatan kerja muda sangat besar.

Migrasi populasi Tiongkok dari desa ke kota karena permintaan tenaga kerja yang besar memberikan implikasi serius. Salah satunya adalah adanya kesenjangan ekonomi antara populasi desa dan kota. Jumlah penduduk di desa juga semakin mengecil. Untungnya pemerintah masih menyediakan infrastruktur yang memadai di daerah perkotaan. Belum lagi para pekerja yang kebanyakan laki-laki meninggalkan keluarganya di desa.

Hal ini kemudian membuat para perempuan di desa memutuskan untuk melacurkan diri di lokalisasi. Industri seksual ini kemudian menjadi semakin marak di Tiongkok. Diperparah dengan tekanan hidup yang ada, membuat banyak perempuan di Tiongkok melakukan bunuh diri, serta semakin tingginya tingkat kriminalitas dan penyimpangan sosial. Di sisi lain, dengan gaji yang rendah para buruh tidak dapat mengirimkan uang ke desanya. Keadaan di desa juga tidak lebih baik, karena dengan berpindahnya para pemuda ke kota juga mengakibatkan pemberdayaan dan pertanian di desa terbengkalai.

Permasalahan Lingkungan

Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan tingkat emisi CO₂ tertinggi di dunia. Pada tahun 2010 tingkat emisi Tiongkok naik sebesar 10,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Suriadji t.t). Minimalisasi ongkos produksi, keuntungan yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi merupakan tujuan kelas yang berkuasa di Tiongkok. Hal ini didasarkan pada eksploitasi buruh murah dan buruh pedesaan. Selain itu juga mengakibatkan degradasi kelestarian lingkungan yang parah. Lima dari sepuluh kota yang paling tinggi polusinya berada di Tiongkok. Proyek Tiga Dam Gorges juga menghancurkan ekosistem dan membunuh banyak populasi. Beberapa pengembang yang serakah juga menghancurkan lahan-lahan pertanian dalam waktu singkat (Lotta 2009).

Tiongkok sekarang telah kehilangan separuh dari lahan suburnya. Pengembang bermodal telah menciptakan bencana ekologis. Diperkirakan para pengembang yang mengakibatkan polusi air, udara, dan bentuk lain degradasi lingkungan lain bertanggung jawab atas kematian 400.000 orang di Tiongkok setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Tiongkok tidak begitu mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam jangka panjang hal ini tidak akan berdampak positif terhadap pencapaian ekonomi Tiongkok karena mengabaikan keberlanjutan.

Relevansi terhadap Indonesia

Kebangkitan Tiongkok yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua digit tidak berlangsung dalam ruang yang vakum. Ada *political will* dari pemerintah untuk mengontrol arus modal yang masuk ke Tiongkok. Kepemilikan tanah masih dikuasai oleh pemerintah. Sehingga tanah sebagai faktor produksi yang sangat penting tetap menjadi sumber daya strategis. Dalam menyambut globalisasi, pemerintah Tiongkok tidak sepenuhnya melakukan neoliberalisasi di semua bidang.

Pertumbuhan Tiongkok juga digerakkan oleh upah buruh yang murah. Rendahnya upah buruh ini juga dipengaruhi cengkeraman Partai Komunis Tiongkok yang mengkooptasi serikat buruh di Tiongkok. Ketersediaan buruh yang murah ini diserbu oleh investor-investor besar dari negara-negara maju. Hal ini ditambah dengan etos kerja yang tinggi dari masyarakat Tiongkok. Dari sisi demografi gender banyaknya populasi laki-laki juga menunjang produktivitas buruh di Tiongkok.

Hal lain yang juga menjadi penting adalah dukungan pemerintah terhadap perusahaan strategis. Pemerintah memberikan subsidi, promosi, dan perlindungan terhadap perusahaan nasional yang bergerak di sektor strategis seperti pertambangan, telekomunikasi, infrastruktur, teknologi tinggi, transportasi, logam dan perikanan. Penguasaan terhadap sektor strategis membuat Tiongkok mampu mengontrol kedaulatan domestiknya. Bahkan lebih dari itu perusahaan milik pemerintah Tiongkok mampu bersaing dalam skala global. Langkah strategis pemerintah Tiongkok

yang berkontribusi pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah membentuk *China Investment Corporation* (CIC). Mengakumulasi cadangan valuta asing dalam *sovereign wealth fund* akan menjadi kartu as bagi Tiongkok di masa mendatang. Surplus perdagangan Tiongkok sekarang dapat dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keberlanjutannya.

Meskipun begitu terdapat beberapa hambatan yang harus dilewati Tiongkok untuk menjadi negara *superpower* seperti degradasi lingkungan, usia populasi yang semakin menua, ketersediaan energi, kurangnya riset dan pengembangan, dan demokratisasi dalam pemerintahan Tiongkok. Ini menjadi tantangan ke depan Tiongkok dalam melanjutkan industrialisasi dan pembangunan domestik.

Strategi khas Tiongkok dalam mempercepat industrialisasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa hal relevan untuk melihat posibilitas Indonesia sebagai *emerging power*. Penguasaan sektor strategis menjadi kunci kemajuan Indonesia ke depan. Ironisnya sumber daya strategis Indonesia oleh pemerintah tidak dikelola dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari langkah presiden Megawati untuk menjual Indosat sebagai perusahaan teknologi telekomunikasi. Kemudian dalam kerjasama dengan Exxon Mobil di Cepu hanya memberikan 20 persen dari hasil pertambangan minyak kepada pemerintah. Belum lagi blok Mahakam dan Natuna juga dilepaskan ke pasar. Dalam sektor perbankan juga pemerintah memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada bank asing untuk beroperasi di Indonesia.

Meskipun begitu beberapa BUMN Indonesia patut diapresiasi kinerjanya. BUMN seperti Pertamina, Semen Indonesia, dan Garuda Indonesia mampu menunjukkan performa yang baik. Pertamina mampu masuk ke dalam jajaran *Global Fortune 500*. Tidak kalah dengan itu, Garuda Indonesia juga masuk dalam 10 penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax mengalahkan Turkish Airlines dan Qantas Airways. Banyak pengamat melihat keberhasilan kedua BUMN ini berkat kepemimpinan dan manajerial direktur BUMN tersebut. Begitu juga Semen Indonesia yang mampu berekspansi ke Vietnam. Ke depan apabila Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhannya maka pemerintah harus memiliki *political*

will untuk menguasai sektor strategis.

Lebih lanjut pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan nasionalisasi sektor strategis, tetapi juga memberikan insentif kepada BUMN dan peningkatan kualitas SDM yang mengoperasikannya. Pemerintah Tiongkok misalnya memberikan subsidi dan membatasi kompetitor BUMN dengan memberikan penalti. Hasilnya tidak ada kompetitor yang kuat bagi BUMN Tiongkok. Pemerintah Indonesia justru melakukan hal yang sebaliknya. Memberikan keleluasaan kepada perusahaan asing untuk dapat beroperasi dan mengalahkan BUMN Indonesia.

Pertumbuhan Indonesia yang besar mencapai 6 persen ditopang oleh sektor konsumsi yang besar. Dengan peningkatan kelas menengah di Indonesia maka meningkat pula sektor konsumsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya ditopang oleh sektor produksi, bukan konsumsi. Barang yang diproduksi di Indonesia seharusnya didistribusikan ke luar negeri. Yang terjadi justru barang tersebut dikonsumsi orang Indonesia.

Indonesia sebenarnya sudah menggunakan *sovereign wealth fund* dengan mendirikan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pada tahun 2011 kinerja PIP mengalami peningkatan sebesar 64,7 persen. Sayangnya pada tahun 2012 kinerja PIP mengalami penurunan. Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 4,06 miliar dolar AS, *sovereign wealth fund* hanya bisa dicapai dengan neraca perdagangan yang surplus.

Meskipun begitu, Indonesia memiliki modal yang besar apabila dibandingkan dengan Tiongkok. Indonesia mampu mengkonsolidasikan demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi ini menjadi penting bagi Indonesia. Kemajuan yang dicapai Tiongkok bukan tanpa resiko dengan dominasi dan komunisme Partai Komunisnya. Tidak adanya transparansi membuat kinerja pemerintahan berjalan tanpa kontrol. Demokrasi juga akan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini juga didukung oleh industri UKM. Hal ini tidak akan terjadi di Tiongkok apabila UKM tersebut tidak memiliki kedekatan dengan elit PKC.

Hanya Indonesia dan Turki yang mampu mengkonsolidasikan demokrasi dan Islam. Ujian bagi demokrasi yang berujung dengan stabilitas atau krisis sudah dilewati Indonesia dalam pilpres kemarin. Dan Indonesia mampu mempertahankan stabilitas dan demokrasinya. Ke depan usaha untuk menuju demokrasi yang substansial akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada pemerataan dan partisipasi masyarakat yang masif. Ini yang mungkin tidak akan dimiliki oleh Tiongkok.

Modal lain yang relevan dengan hambatan Tiongkok adalah bonus demografi. Pada tahun 2030 populasi masyarakat Indonesia akan didominasi usia produktif. Berbeda dengan Tiongkok yang pada tahun tersebut populasinya akan menua sehingga rasio ketergantungan akan tinggi. Namun bagaimana memanfaatkan bonus demografi akan tergantung bagaimana pengelolaan SDM terutama reformasi di sektor pendidikan. Sehingga pada saat bonus demografi terjadi SDM kita tidak hanya menjadi pekerja non-terampil.

Strategi yang juga relevan bagi Indonesia adalah pemanfaatan diaspora. Tiongkok mengimpor diasporanya yang belajar di luar negeri. Sementara diaspora Indonesia menyebar dan tidak berkontribusi banyak terhadap kemajuan Indonesia. Pembangunan Tiongkok memang kurang dalam pengembangan dan riset, tapi hambatan itu segera direspon dengan mengimpor diaspora yang bertalenta untuk berkontribusi dalam pembangunan Tiongkok.

Penggunaan *triple helix* dengan menyinergikan pemerintah, industri, dan ilmuwan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Keberadaan LIPI, BPPT, dan Masyarakat Ilmuan dan Teknolog Indonesia (MITI) yang tidak mendapatkan suntikan modal dari investor dan pengusaha dan kemudahan regulasi dari pemerintah. Sinergi antar ketiga aktor ini akan berkontribusi besar terhadap upaya Indonesia menjadi *emerging power* ke depan. Pengembangan industri tanpa riset dan teknologi akan memiliki nilai tambah yang rendah.

Kemungkinan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi baru akan sangat tergantung kemampuan pemerintah untuk mengaktualisasikan relevansi strategi Tiongkok dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan ini semakin besar melihat modalitas Indonesia berupa sumber daya alam, demokrasi, dan bonus demografi. Kebijakan strategis dalam mengelola modalitas ini menjadi penentu apakah Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi baru.

Kesimpulan

Sejak diberlakukannya kebijakan baru oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mengalami kemajuan di bidang ekonomi yang kemudian merambah bidang lain. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia baru ini disebabkan beberapa hal seperti penguasaan negara dalam perusahaan-perusahaan di sektor strategis, kebijakan luar negeri *sovereign wealth fund*, industrialisasi, serta kekuatan militer yang terus ditingkatkan. Akan tetapi, meski telah meraih kesuksesan sebagai kekuatan ekonomi baru dunia, Tiongkok tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti masalah lingkungan dan demografi. Dari kesuksesan Tiongkok serta kelemahannya, Indonesia dapat mengambil relevansinya untuk tujuan pembangunan negeri ini ke depannya. Indonesia memiliki potensi untuk mampu meraih kesuksesan sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Potensi tersebut berupa sumber daya alam, demokrasi, dan demografi. Indonesia terbilang lebih baik dibanding Tiongkok dalam tiga hal ini. Sehingga, Indonesia dinilai mampu untuk dapat bangkit dan membangun negerinya. Kendati demikian potensi yang telah dimiliki Indonesia ini juga tetap memerlukan inisiatif dari pemerintah untuk mengolah dan mengembangkannya. Oleh sebab itu, keberhasilan Indonesia nantinya ditentukan pada bagaimana strategi kebijakan pemerintah dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Cimbala, Stephen J., 2005. *Nuclear Weapon and Strategy: U.S Nuclear Policy for the Twenty-First Century*. London: Routledge
- Suriadjati, et.al, tt. *Politik Internasional: Analsis Inkonsistensi Cina dalam Masalah Lingkungan*.
- Kristof, Nicholas, D, 1993. *The Rise of China*, *Foreign Affairs*, 72 (5) : 59-74.
- Lotta, Raymond, 2009. *China Rise in the World Economy*, *Economy and Political Weekly*, 44 (8) : 29-34.
- Martin, Michael F, 2010. *China's Sovereign Wealth Fund: Developments and Policy Implication*, *CRS Report for Congress*.
- Shenkar, Oded, 2006. *China's Economic Rise and the New Geopolitics*, *International Journal*, 6 (2) : 313-319
- Straszheim, Donald H., 2008. *China Rising*, *World Policy Journal*, 25 (3) : 157-170.